



RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI TAHUN 2024

RANHIR RENJA KECAMATAN JUAI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2025 dapat dibuat.

Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2025 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pembuatan Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Juai, Agustus 2024

Camat Juai,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT" at the top and "KECAMATAN JUAI" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "NANANG EDWARD, S.Sos., MM" and the NIP number "NIP. 19800127 200604 1 016" are printed in bold black text.

NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP. 19800127 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	61
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	67
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Juai.....	67
4.2. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi	77
BAB.V PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah. Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan .

Dalam penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal dan disesuaikan di rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja SKPD tahun 2025 adalah Penjabaran dari Renstra SKPD tahun 2021-2026.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2025 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. Tahunn 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Perme Peraturan Menteri Dalam Negeri ndagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubaha Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasifikasi,kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No.05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

1.3.Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2025 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Juai dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misi

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Kecamatan Juai sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

1.3.2 Tujuan

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rancangan Akhir (Ranhir)) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra Kecamatan Juai Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Juai; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 Kecamatan Juai telah melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.4.812.679.541,00 dan serapan anggaran mencapai 92,09% atau sebesar Rp.4.432.197.076,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.327.162.076,00 atau 92,08% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.514.300.984,00 atau sekitar 89,93% dan belanja barang sebesar Rp1.812.861.092,00 atau sekitar 95,39 % serta belanja modal sebesar Rp.105.035.000,00 atau sekitar 92,66%. Data capaian target kinerja dan keuangan untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Juai Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	Capaian Keuangan	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota	3.336.610.453	3.140.909.850	90,62	108,51%
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	55.396.700	55.116.700	99,18	100%
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	47.190.000	46.990.000	99,99	100%
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD</i>	3.066.700	3.066.700	96,26	100%
1.1.3	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	5.140.000	5.060.000	95,06	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.542.847.953	2.357.497.662	90,09	100%
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.463.681.353	2.282.861.062	89,83	77,27%
1.2.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	79.166.600	74.636.600	96,78	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.600.000	80.921.800	99,17	100%
1.3.1	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan</i>	81.600.000	80.921.800	99,17	213,33%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.247.400	314.932.800	97,43	100%
1.4.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan</i>	1.460.900	1.460.900	100	100%

	<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>				
1.4.2	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	116.057.500	107.742.900	92,84	100%
1.4.3	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	125.640.000	125.640.000	100	100%
1.4.4	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	80.089.000	80.089.000	100	100%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	213.705.900	156.376.132	73,17	100%
1.5.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat</i>	70.536.100	50.536.100	71,65	100%
1.5.2	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	135.336.000	98.040.032	72,44	100%
1.5.3	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.833.800	7.800.000	99,57	100%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.910.350	206.172.700	98,22	100%
1.6.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	66.750.000	64.606.550	95,86	100%
1.6.2	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	90.346.350	86.608.700	100	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	96,268,100	96,238,100	99,97	100%
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	86.217.700	86.217.700	100	100%

	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
2.1.1	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	86.217.700	86.217.700	100	100%
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	10.050.400	10.020.400	99,7	100%
2.2.1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	10.050.400	10.020.400	99,7	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	199,160,300	199,130,300	99,98	100%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.046.600	74.036.600	99,99	100%
3.1.1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	5.129.200	5.119.200	99,81	100%
3.1.2	<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	63.087.400	63.087.400	100	100%
3.1.3	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	5.830.000	5.830.000	100	100%
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	125.113.700	125.093.700	99,98	100%

3.2.1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	125.113.700	125.093.700	99,98	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,878,800	119,478,800	99,67	100%
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,878,800	119.478.800	99,67	100%
4.1.1	<i>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	119,878,800	119.478.800	99,67	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	341.236.500	339.053.100	99,36	100%
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	341.236.500	339.053.100	99,36	100%
5.1.1	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	143.414.100	143.304.900	99,92	100%
5.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan</i>	197.822.400	195.748.200	98,95	

	<i>Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>				
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	230,672,500	211,587,500	91,73	100%
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	230.672.500	211.587.500	91,73	100%
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	89.563.900	70.479.100	78,69	100%
6.1.2	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	88.390.200	88.390.200	100	100%
6.1.3	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	52.718.400	52.718.200	100	100%
TOTAL		4.812.679.541	4.432.197.076	92,09%	103,36%

Dari rencana kerja tahun 2023 serta target dan realisasinya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian keuangan adalah sebesar 92,09% sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 103,36% dikarenakan terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) sub kegiatan yang capaiannya berada di atas 100%.
2. Rata-rata capaian keuangan atas realisasi keuangan semua sub kegiatan adalah sebesar 92,90% dan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100% dikarenakan terdapat capaian kinerja lebih dari 100% pada sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan namun terdapat capaian kinerja di bawah 100% untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
3. Rata-rata capaian keuangan atas realisasi keuangan semua kegiatan adalah sebesar 91,73% dan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%.
4. Rata-rata capaian keuangan atas realisasi keuangan semua program adalah sebesar 96,89% dan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 101,42% dikarenakan capaian kinerja program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota sebesar 108,51%.

Hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja renja Tahun 2023 Kecamatan Juai sampai dengan triwulan I tahun 2024 secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68.65 nilai	70,22	67,00	72,70	108,51%	67,50	72,70	107,70%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	36 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	20 Dokumen	55,55%

	Perangkat daerah yang disusun								
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan SKPD</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>50,00%</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen RKA dan DPA</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>50,00%</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	<i>72 bulan</i>	<i>24 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>39 bulan</i>	<i>54,17%</i>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>22 Orang/Bulan</i>	<i>20 Orang / Bulan</i>	<i>22 Orang/Bulan</i>	<i>17 Orang/Bulan</i>	<i>77,27%</i>	<i>22 Orang/Bulan</i>	<i>17 Orang/Bulan</i>	<i>77,27%</i>

<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>48 Dokumen</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>15 Dokumen</i>	<i>31,25%</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	39 bulan	54,17%
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>90 Orang</i>	<i>30 Orang</i>	<i>15 Orang</i>	<i>32 Orang</i>	<i>213,33%</i>	<i>0 Orang</i>	<i>62 Orang</i>	<i>68,89%</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	39 bulan	54,17%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi</i>	<i>Jumlah Paket Komponen</i>	<i>6 Paket</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>4 Paket</i>	<i>66,67%</i>

<i>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>								
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>6 Paket</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>3 Paket</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>6 Paket</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>3 Paket</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>72 Laporan</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>39 bulan</i>	<i>54,17%</i>
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>24 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>39 bulan</i>	<i>54,17%</i>

<i>Penyediaan Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>66,67%</i>
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>72 Laporan</i>	<i>24 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>39 Laporan</i>	<i>54,17%</i>
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>66,67%</i>
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya</i>	<i>Jumlah Kendaraan</i>	<i>13 Unit</i>	<i>13 Unit</i>	<i>13 Unit</i>	<i>13 Unit</i>	<i>100%</i>	<i>13 Unit</i>	<i>13 Unit</i>	<i>100%</i>

<i>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	<i>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>								
<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>100%</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>100%</i>
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,00%	50,00%
<i>Peningkatan Efektifitas</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>50,00%</i>

<i>Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>50,00%</i>	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%	

Kelurahan	dan kelurahan								
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>90 LKD</i>	<i>0 LKD</i>	<i>60 LKD</i>	<i>60 LKD</i>	<i>100%</i>	<i>70 LKD</i>	<i>60 LKD</i>	<i>66,67%</i>
<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>

<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>
<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan</i>	<i>50 Keluarga</i>	<i>50 Keluarga</i>	<i>50 Keluarga</i>	<i>50 Keluarga</i>	<i>100%</i>	<i>50 Keluarga</i>	<i>0 Keluarga</i>	<i>0%</i>

	<i>Berdaya Saing</i>								
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>66,67%</i>
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%

Umum	pemerintahan umum								
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	0%

Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
<i>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,</i>	<i>126 Orang</i>	<i>126 Orang</i>	<i>126 Orang</i>	<i>126 Orang</i>	<i>100%</i>	<i>126 Orang</i>	<i>0 Orang</i>	<i>0%</i>

	<i>Regional, dan Nasional</i>								
<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Pembangunannya	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	100%	21 Desa	21 Desa	100%
<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>

	<i>dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>								
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>

	<i>Partisipatif</i>								
<i>Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>66,67%</i>

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”** maka dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Juai akan mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah Kecamatan Juai melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut di atas maka Kecamatan Juai selaku pemangku urusan pemerintahan unsur kewilayahan perlu menentukan tujuan dan sasaran berserta indikator pengukur yang mendukung pencapaian target tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen Renstra Penyesuaian SKPD Kecamatan Juai tahun 2021 – 2026 pada tabel T-C.25 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Juai

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial	87,50 %	87,55 %	87,60 %	87,65 %	87,70 %	87,75 %
	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	-	60	70	80	90
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
		persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel T-C.30 di bawah ini.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan

No.	Indikator	S P M	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial	-	-	87,55	87,60	87,65	87,70	87,59	87,62	87,65	87,70	
2	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	-	-	60 LKD	70 LKD	80 LKD	-	60 LKD	70 LKD	80 LKD	
3	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
4	persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
5	persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

Adapun penjelasan dari capaian kinerja pelayanan Kecamatan Juai di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian tahun 2022 adalah sebesar 87,59 yang didapat dari formula perhitungan nilai IKM semester 1 tahun 2022 ditambah nilai IKM semester 2 tahun 2022 lalu dibagi 2 (dua). Nilai IKM semester 1 tahun 2022 adalah 87,56 dan IKM semester 2 tahun 2022 adalah 87,62 sehingga didapat rata-rata untuk IKM tahun 2022 sebesar 87,59.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 yang disusun oleh Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Juai. Nilai rata-rata IKM Kecamatan Juai didapat dari jumlah IKM semester I dan Semester II dibagi 2 (dua). Adapun nilai IKM semester 1 tahun 2023 adalah sebesar 87,51 dan semester 2 sebesar 87,73 sehingga jika kedua nilai IKM

tersebut dijumlahkan dan dibagi 2 (dua) maka didapat nilai IKM tahun 2023 adalah sebesar 87,62.

3. Capaian tahun 2022 untuk indikator LKD aktif tidak dapat diidentifikasi dikarenakan penetapan indikator LKD sebagai salah satu indikator sasaran SKPD Kecamatan Juai pada tahun 2023 sehingga pada tahun 2022 hal tersebut belum dilaksanakan.
4. Capaian tahun 2023 terhitung sebesar 60 (enam puluh) LKD dimana LKD dimaksud tersebar di 21 (dua puluh satu) desa dan dari berbagai kelompok LKD yaitu PKK, RT/RW, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
5. Adanya penyediaan dana pada sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, lancarnya koordinasi antar forkopimcam, kecamatan dan desa, serta adanya bantuan lembaga hukum berupa ruang restorative justice memungkinkan pencapaian 100% indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani.
6. Formulasi perhitungan capaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah Jumlah LPPD dan laporan kinerja BPD yang disampaikan dibagi jumlah seluruh desa dibagi 2 dikali 100% sedangkan indikator persentase desa tertib administrasi keuangan dicapai dengan formulasi perhitungan jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% dimana semua desa melaksanakan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Adanya sanksi dan penyediaan anggaran untuk pencapaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan dan persentase desa tertib administrasi keuangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Juai maka perlu dilakukan analisis terhadap organisasi perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang mengurus tentang pelayanan terhadap masyarakat suatu wilayah yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan Juai maka peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Juai. Ketika pelayanan publik di kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah kabupaten balangan khususnya di Kecamatan Juai.

Selain sebagai penyedia layanan publik masyarakat, kecamatan juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan serta ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di kecamatan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan desa baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di desa menjadi tanggung jawab kecamatan. Begitu pula halnya dengan pembinaan dan pengawasan (evaluasi) pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisa atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Juai sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan/diidentifikasi berberapa permasalahan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan SKPD di Kecamatan Juai yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya petugas pelayanan yang berkompeten
2. Kurangnya dana tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan baik sarana prasarana, SDM petugas layanan maupun SDM penerima layanan.
3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
4. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan belum seluruhnya dilakukan dengan baik
5. Pengelolaan tingkat kemandirian desa belum dilaksanakan secara baik khususnya dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi
6. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan desa.

Selain permasalahan yang mungkin menghambat pencapaian target tujuan SKPD, Kecamatan Juai selaku SKPD yang mengampu urusan unsur kewilayahan dan bertugas menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Juai maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Juai yaitu :

1. Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.
2. Adanya tuntutan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun yang benar dan tepat waktu serta mudah diakses oleh masyarakat.
3. Adanya ekspektasi masyarakat agar pemerintah daerah semakin aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan teridentifikasinya permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi maka Kecamatan Juai dapat menetapkan solusi atas permasalahan dan tantangan tersebut dengan menentukan peluang atau faktor pendukung pencapaian target tujuan SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa.
2. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
3. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup.
4. Adanya pelatihan peningkatan SDM / penjenjangan karir.
5. Adanya digitalisasi sistem perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Juai tahun 2025 terdapat 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Namun setelah dilakukan pembahasan/Evaluasi dengan Tim Penganggaran Perangkat Daerah (TAPD) Kabupaten Balangan dan DPRD Kabupaten Balangan maka terdapat tambahan anggaran dan perubahan sub kegiatan yang digunakan. Adapun tambahan dana yang disediakan di rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 dibandingkan dengan rancangan awal rencana kerja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.239.933.152,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang tersebar di semua sub kegiatan. Sedangkan perubahan sub kegiatan dan kegiatan di rancangan akhir rencana kerja tahun 2025 adalah 2 (dua) sub kegiatan bertambah, 1 (satu) sub kegiatan berkurang (hapus) dan 1 (satu) kegiatan bertambah. Sehingga jika dijumlahkan maka jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan di rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Juai tahun 2025 adalah 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang direncanakan untuk menyediakan anggaran pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten dipindahkan ke sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dikarenakan pelaksana teknis kegiatan yang akan dilakukan oleh seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial sehingga pendanaan pun dipindahkan ke sub kegiatan yang diampu oleh seksi tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Atau dengan kata lain sub kegiatan Pelaksanaan

Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dihapus dari rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Juai tahun 2025.

Sedangkan anggaran untuk sub kegiatan baru yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya tidak ada di dokumen rancangan awal rencana kinerja dimasukkan di rancangan akhir rencana kinerja Kecamatan Juai tahun 2025 atas saran/rekomendasi hasil pembahasan rancangan anggaran dengan TAPD dan DPRD Kabupaten Balangan mengingat penyelenggaraan kedua sub kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan di tahun 2025. Hal ini menyebabkan penambahan 1 (satu) kegiatan baru yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada dokumen rencana akhir rencana kerja Kecamatan Juai tahun 2025.

Dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, diharapkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dapat dicapai. Hal ini tentunya akan berimbas kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk menyikapi hal ini, Kecamatan Juai akan terus melakukan koordinasi terutama dengan Bapperida Kabupaten Balangan. Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Rencana Kecamatan Juai terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di bawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Balangan

SKPD : Kecamatan Juai

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,50	4.346.915.952,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Balangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,00	5.468.559.980,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	172.884.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	411.168.600,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	22.254.600,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	121.588.700,00	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	32.086.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	103.442.700,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	113.827.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	161.217.200,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.715.600,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	17.050.000,00	
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	7.870.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.367.434.700,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.555.252.180,00	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang per bulan	3.208.671.900,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang per bulan	3.269.842.080,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	158.762.800,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	285.410.100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	28.613.000,00						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	28.613.000,00						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	152.396.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	670.777.700,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.311.100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.204.700,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	107.084.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	148.959.800,00	

		yang Disediakan					yang Disediakan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	41.001.100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	514.613.200,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	366.571.252,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	385.925.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	199.936.352,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	118.502.800,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.534.900,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142.584.900,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.100.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	124.837.300,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	259.015.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	445.436.500,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	129.181.900,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	318.155.500,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	129.833.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	127.281.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	420.186.900,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	376.797.500,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	159.997.800,00	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	177.459.200,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 Laporan	159.997.800,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	1 Laporan	177.459.200,00	

		Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	260.189.100,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	199.338.300,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	260.189.100,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	199.338.300,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	205.054.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	331.439.800,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	148.946.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	214.677.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Balangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Lembaga Kemasyarakatan	44.328.800,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Balangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.515.100,00	

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	60.785.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	95.907.400,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	43.832.700,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.254.500,00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Balangan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	56.107.500,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Balangan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	116.762.800,00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Kab. Balangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	50 keluarga	56.107.500,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Kab. Balangan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	116.762.800,00	

Berkualitas dan Berdaya Saing		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Berkualitas dan Berdaya Saing					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	160.177.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	294.334.600,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	160.177.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	294.334.600,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	160.177.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	294.334.600,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan	1 Laporan	83.596.400,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan	1 Laporan	383.977.000,00	

		Sesuai SOP					Sesuai SOP			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Balangan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	83.596.400,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Balangan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	383.977.000,00	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	130 Orang	83.596.400,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	130 Orang	220.200.000,00	
					Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	163.777.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	324.002.900,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	516.388.800,00	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	21 Desa	324.002.900,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	21 Desa	516.388.800,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	106.360.100,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	198.483.200,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	79.816.800,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	108.117.600,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30.317.700,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	56.389.800,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	60.017.700,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	67.697.200,00	

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	47.490.600,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	85.701.000,00	
				5.539.933.152,00					7.371.497.680,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan program kegiatan masyarakat diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Juai yang dilaksanakan Bulan Januari 2024, untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Namun untuk usulan tersebut masyarakat wilayah Kecamatan Juai melalui Musrenbang desa atau Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagian besar usulan program/kegiatan didominasi oleh kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga yang paling berperan dalam artian SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Dinas Peternakan, Kecamatan Juai, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Kecamatan juai dalam hal usulan ini, ada beberapa usulan yang program yang dapat dikaji atau ditelaah oleh dinas terkait dengan pagu yang disusun oleh masing – masing dan untuk program/kegiatan yang ada tetap bersifat rutin dan pelayanan untuk menunjang pencapaian target kinerja SKPD Kecamatan Juai. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Juai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Pembuatan pagar keliling kantor camat (USULAN LAMA)	Kec. Juai		Rp. 400.000.000,00	Belum memiliki pagar belakang
2	Siring Beronjong (USULAN LAMA)	Galumbang		Rp. 200.000.000,00	Karena kondisi dilapangan makin terkikis air
3	Pembuatan Jembatan Layang R2 untuk evakuasi banjir (mungkur uyam - sumber rejeki) L ebar 2M Panjang 600 M	Mungkur Uyam - Sumber Rejeki		Rp. 1.500.000.000,00	Tidak ada jalan alternatif penghubung 2 desa saat banjir
4	Paving Blok Seluruh Area Pasar Mungkur Uyam	Mungkur Uyam		Rp. 200.000.000,00	Paving blok baru di pasang sebagian, kondisi berlumpur saat hujan
5	Box Kontainer UMKM 35 buah	Mungkur Uyam		Rp. 1.750.000.000,00	Lapak pedagang masih sederhana, berupa susunan bambu dan rawan roboh saat hujan deras
6	Pengadaan tanah untuk jalan Teluk Bayur - Mungkur Uyam (USULAN LAMA)	Teluk Bayur- Mungkur Uyam		Rp. 200.000.000,00	Saat haulan jalan utama penuh sesak

7	Pembuatan Jalan Teluk Bayur - Mungkur Uyam (USULAN LAMA)	Teluk Bayur- Mungkur Uyam		Rp. 200.000.000,00	Saat haulan jalan utama penuh sesak
8	Pengadaan Tanah Ruang Taman Hijau 5 Hektar (USULAN LAMA)	Kec. Juai		Rp. 1.000.000.000,00	Belum memiliki RTH di kecamatan juai
9	Pengadaan Tanah Untuk Sarana & Prasarana Publik (PUSKESMAS Rawat Inap) (USULAN LAMA)	Kec. Juai		Rp. 400.000.000,00	Puskesmas belum memiliki sarana rawat inap
10	Rehab Rumah Camat (USULAN LAMA)	Kec. Juai		Rp. 300.000.000,00	Rumah camat perlu perbaikan
11	Rehab Total Makam Pahlawan	Teluk Bayur		Rp. 200.000.000,00	Makam perlu perbaikan
12	Vaping Halaman Kantor Camat	Kec. Juai		Rp. 200.000.000,00	Vaping belakang kantor camat belum selesai
13	Fasilitas RTH	Mungkur Uyam		Rp. 300.000.000,00	Belum memiliki RTK di kecamatan juai
14	Pengadaan tanah area pedagang Makam Datuk Kandang Haji 1 Hektar	Teluk Bayur		Rp. 200.000.000,00	Sekeliling makam belum memiliki tempat untuk pedagang
15	Jalan Alternatif Haul Datu Kandang Haji	Mungkur Uyam - Teluk Bayur		Rp. 300.000.000,00	Saat haul jalan penuh sesak
16	Pembutan jalan baru Muara Ninian sampai Hukai (USULAN LAMA)	Muara Ninian- Hukai		Rp. 500.000.000,00	Karena jalan yang ada sudah rusak dan tikungan terlalu tajam
17	Pembutan jembatan kerangka baja Desa Muara Ninian	Muara Ninian		Rp. 500.000.000,00	Jembatan dalam keadaan rusak
18	Pembuatan jembatan Box Carpet 2 paket	Sirap-Mungkur Uyam		Rp. 400.000.000,00	Jembatan dalam keadaan rusak
19	Pengadaan Tanah Untuk Pasar Juai	Mungkur Uyam		Rp. 250.000.000,00	Belum adanya pasar juai

20	Pengadaan dan pemasangan PJU listrik	Sumber Rejeki		Rp. 600.000.000,00	PJU yang ada belum mencukupi
21	Pengerasan Tempat Parkir Datuk Kandang Haji Teluk Bayur	Teluk Bayur		Rp. 300.000.000,00	Jika hujan tempat parkir jadi becek/tidak layak
22	Pengerasan Lingkungan Makan Pahlawan	Teluk Bayur		Rp. 300.000.000,00	Jalan masih berupa tanah
23	Tempat Parkir Kecamatan Juai	Kec. Juai		Rp. 200.000.000,00	Parkiran tidak muat lagi dan perlu perluasan
24	Rehap Total AULA Bertingkat	Kec. Juai		Rp. 400.000.000,00	Kondisi Aula sudah sangat memperhatikan
25	Pengadaan Mobil Tangki Pemadam Kebakaran	Kec. Juai		Rp. 400.000.000,00	Karna belum mempunyai
26	Mobil Angkutan (Pick Up)	Kec. Juai		Rp. 250.000.000,00	Karna belum mempunyai
27	PENGADAAN TPA (SAMPAH)	Kec. Juai		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai TPA
28	Pengadaan Buku untuk perpustakaan (Buku belajar, Cerita Anak, referensi, fiksi)	PERPUSTAKAAN		Rp. 50.000.000,00	Menambah wawasan anak-anak
29	Pemasangan INTERNET	PERPUSTAKAAN		Rp. 50.000.000,00	Belum mempunyai akses Internet
30	Pengadaan Tanah Sport Center Olah Raga Kecamatan	Kec. Juai		Rp. 300.000.000,00	Karna belum mempunyai
31	Rehab Kantor KUA Bertingkat	Kec. Juai		Rp. 400.000.000,00	Kondisi sudah tidak layak dan perlu perbaikan
32	Rehab Total Rumah Dinas Koramil Menjadi 5 Pintu	Kec. Juai		Rp. 300.000.000,00	Kondisi sudah tidak layak dan perlu perbaikan
33	Rehab Total Kantor Koramil Kec. Juai	Kec. Juai		Rp. 200.000.000,00	Kondisi sudah tidak layak dan perlu perbaikan
34	Perbaikan Sarana & Prasarana Perkantoran Kapolsek Juai	Teluk Bayur		Rp. 300.000.000,00	Kondisi sudah tidak layak dan perlu perbaikan
35	Pembuatan Pagar Samping dan Belakang	Kec. Juai		Rp. 150.000.000,00	Belum ada pagar samping dan belakang

	Puskesmas (DINKES)				
36	Pemasangan Paving Blok halaman samping Puskesmas (DINKES)	Kec. Juai		Rp. 50.000.000,00	Kondisi masih berupa tanah
37	Drainase Air (DINKES)	Kec. Juai		Rp. 15.000.000,00	Belum adanya drainase
38	Taman Fisiotherafi (DINKES)	Kec. Juai		Rp. 20.000.000,00	Belum memiliki taman fisiotherafi
39	Anti Selip Tangga (DINKES)	Kec. Juai		Rp. 7.000.000,00	Tangga tidak ada anti slip
40	Rehab Total Puskemas	Sumber Rejeki Dusun VI		Rp. 1.260.000.000,00	Karna bangunan lama
41	Rehab Rumah Dinas Kecamatan 4 Buah	Kec. Juai		Rp. 864.000.000,00	Kurang layak
42	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Sumber Rejeki Dusun VI		Rp. 52.500.000,00	Belum Memiliki
43	Rehabilitasi Atap dan Pelapon + Instalasi Listrik Ruang Kelas 4,5,6	SDN MUNGKUR UYAM		Rp. 180.000.000,00	Berbaikan atap dan pelapon
44	Pemasangan Pelapon + Instalasi Listrik Ruang Kelas 1,2,3	SDN MUNGKUR UYAM		Rp. 99.000.000,00	Belum ada
45	Pengecoran Halaman (dalam) untuk Lapangan Upacara dan Olah Raga	SDN MUNGKUR UYAM		Rp. 87.500.000,00	Halaman masih berupa tanah
46	Vaping blok seluruh lingkungan sekolah	Paud Terpadu Negeri Juai		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai
47	Parkiran	Paud Terpadu Negeri Juai		Rp. 150.000.000,00	Belum mempunyai tempat parkir

48	Pembuatan kubung tempat bermain	PAUD Terpadu Negeri Juai		Rp. 100.000.000,00	Belum mempunyai
49	Perbaikan dapur	Paud Terpadu Negeri Juai		Rp. 100.000.000,00	Dapur yang ada kurang layak untuk dipakai
50	Tempat menunggu orang tua	Paud Terpadu Negeri Juai		Rp. 100.000.000,00	Belum mempunyai tempat ruang tunggu
51	Pembuatan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anggur	PKBM Anggur		Rp. 200.000.000,00	Belum memiliki
52	Vaping blok seluruh lingkungan sekolah	SMP Negeri 1 Juai		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai
53	Drum Band Beserta Pelatuhnya	SMP Negeri 1 Juai		Rp. 150.000.000,00	Belum mempunyai
54	Pagar Sekolah	SMP Negeri 1 Juai		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai
55	Drainase Sekolah	SMP Negeri 1 Juai		Rp. 150.000.000,00	Belum adanya drainase
56	Pembuatan box culvet 4x7	Desa Bata Rt.1 dan Rt.2		Rp. 800.000.000,00	banyak rumah warga yang terendam saat banjir, karena belum ada pembuangan Air
57	Peninggian jalan raya cor beton	Desa Bata Rt.1 dan Rt.2		Rp. 1.000.000.000,00	Jalan raya rusak parah dan tergenang air saat musim banjir
58	Pembuatan beronjong	Desa Bata Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Jembatan hampir jatuh ke sungai dikarenakan tidak ada penahan Tanah
59	Pembuatan jembatan gantung	Desa Bata Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Akses penyebarangan sungai untuk masyarakat mengangkut hasil pertanian tidak ada

60	Pembuatan siring jalan	Desa Bata Rt.1		Rp. 180.000.000,00	Jalan raya yang sempit dan mudah terkikis oleh air
61	Rehab penggilingan padi	Desa Bata Rt.1		Rp. 150.000.000,00	Penggilingan padi rusak parah
62	Pembuatan gedung TK	Desa Bata Rt.2		Rp. 150.000.000,00	Belum ada sekolahan TK, banyak anak-anak yang ingin sekolah
63	Peningkatan pembuatan beronjong	Desa Bata Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Rumah warga hampir jatuh ke sungai karena tanah terkikis dan longsong
64	Mesin comben	Desa Bata Rt.1 dan Rt.2		Rp. 500.000.000,00	Saat musim panen banyak warha yang kelamaan menunggu anterian mesin peruntuk padi
65	Rumah tidak layak huni	Desa Teluk Bayur Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 1.000.000.000,00	Karena masih ada rumah yang tidak layak huni
66	Rumah tidak layak huni	Desa Teluk Bayur Rt.1		Rp. 300.000.000,00	Akses tidak bisa di lewati
67	Pembuatan JUT Piah	Desa Teluk Bayur Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Akses rusak dan tidak layak pakai
68	Pembuatan JUT Tanjungan	Desa Teluk Bayur Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Akses rusak dan tidak layak pakai
69	Perahu fiber	Desa Teluk Bayur Rt.1		Rp. 400.000.000,00	Sering terjadinya banjir
70	Pengaspalan jalan desa dan drainase	Desa Pamurus Rt.1 dan Rt.2		Rp. 800.000.000,00	Musim hujan sering tergenang sehingga sering terjadi kecelakaan
71	Pengecoran jalan lingkungan desa	Desa Pamurus Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Jalan rusak berlobang membahayakan pengguna jalan

72	Pagar pembatas area makam	Desa Pamurus Rt.2		Rp. 300.000.000,00	Seringnya hewan berkeliaran di area pemakaman
73	Cor lapangan futsal	Desa Pamurus Rt.1		Rp. 250.000.000,00	Karena lapangan terdahulu mengalami kerusakan
74	Gedung serbaguna (olahraga)	Desa Pamurus Rt.1		Rp. 450.000.000,00	Desa belum memiliki
75	Pengadaan PJU	Desa Pamurus Rt.1, Rt.2 dan Rt.3		Rp. 750.000.000,00	Karena tidak ada penerangan jalan
76	Pengerokkan sungai	Desa Pamurus Rt.1 dan Rt.2		Rp. 600.000.000,00	Pada musim hujan sungai tidak bisa menampung air hujan sehingga mengakibatkan banjir
77	Titian sambungan jembatan gantung (pundasi)	Desa Marias Rt.2		Rp. 250.000.000,00	Titian saat ini rusak parah
78	Peningkatan jalan produksi	Desa Marias Rt.1		Rp. 4.000.000.000,00	Jalan rusak parah dan berlobang
79	Lanjutan wisata	Desa Marias Rt.3		Rp. 2.000.000.000,00	Peningkatan ekonomi masyarakat
80	Pembuatan gedung futsal	Desa Marias Rt.1		Rp. 870.000.000,00	Belum tersedia lapangan Futsal
81	Bronjong ujung drainase penahanan dinding sungai	Desa Marias Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Dinding sungai mengalami longsor akibat derasnya aliran drainase
82	Gudang aset kuburan muslimin	Desa Marias Rt.2		Rp. 100.000.000,00	Tidak ada gudang penyimpanan aset
83	Pembangunan TPA	Desa Marias Rt.3		Rp. 250.000.000,00	Masing menumpang ditempat ibadah
84	Pembuatan gedung posyandu	Desa Tigarun Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Karena belum memiliki gedung posyandu
85	Pembuatan gedung serbaguna buat Musdes untuk mengumpulkan orang banyak dalam ruangan (Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat)	Desa Tigarun Rt.2		Rp. 180.000.000,00	Karena belum memiliki gedung

86	Pembuatan gedung bulu tangkis	Desa Tigarun Rt.1		Rp. 300.000.000,00	Karena belum memiliki gedung
87	Pembuatan jalan usaha tani	Desa Tigarun Rt.1 dan Rt.2		Rp. 600.000.000,00	Karena akses jalan sulit dilewati
88	Pembuatan drainase	Desa Tigarun Rt.1 dan Rt.2		Rp. 100.000.000,00	Karena belum memliki saluran air
89	Pembuatan fasilitas parkir SD Gulinggang 1	Desa Gulinggang Rt. 2 dan Rt.3		Rp. 50.000.000,00	Karena di halaman kantor tidak ada tempat parkir buat aparat
90	Pembuatan jalan usaha tani	Desa Gulinggang Rt.1, Rt. 2 dan Rt.3		Rp. 600.000.000,00	Untuk memudahkan mengangkut barang hasil tani
91	Pembuatan gedung olahraga	Desa Gulinggang Rt.1		Rp. 300.000.000,00	Memudahkan masyarakat berkegiatan olahraga
92	Pembuatan perpustakaan desa	Desa Gulinggang Rt.3		Rp. 100.000.000,00	Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi
93	Pembukaan lahan tidur persawahan	Desa Gulinggang Rt.2		Rp. 49.000.000,00	Banyak lahan persawahan yang tidak dikerjakan oleh masyarakat
94	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Desa Gulinggang Rt.1		Rp. 50.000.000,00	Sungai kotor dan dangkal
95	Pembangunan saluran air persawahan baru (irigasi)	Desa Gulinggang Rt.3		Rp. 120.000.000,00	Untuk pengairan sawah-sawah yang baru
96	Pembangunan saluran drainase gorong-gorong	Desa Gulinggang Rt.1, Rt. 2 dan Rt.3		Rp. 150.000.000,00	Air melimpah kejalan raya

97	Pengadaan bibit dan pupuk Urea/Poska Untuk Pertanian	Desa Gulinggang Rt.1, Rt. 2 dan Rt.3		Rp. 50.000.000,00	Peningkatan produksi karet, padi dan parawija
98	Bantuan bibit ternak sapi dan ternak itik	Desa Gulinggang Rt.1, Rt. 2 dan Rt.3		Rp. 100.000.000,00	Peningkatan taraf hidup masyarakat
99	Penambahan ruangan kantor desa	Desa Juai Rt.4		Rp. 300.000.000,00	Karena banjir
100	Pembuatan JUT Liu Padang	Desa Juai Rt.1		Rp. 700.000.000,00	Jalan yang rusak parah
101	Pembuatan posko banjir/pengungsian	Desa Juai Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 500.000.000,00	Banjir
102	Pembuatan JUT jaturaan	Desa Juai Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Masyarakat susah mengangkut hasil panen padi
103	Perbaikan JUT kadam hilir	Desa Juai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Jalan rusak parah dan berlobang
104	Peninggian jembatan tangkarawak Jalan Tangkarawak Menuju Sungai	Desa Juai Rt.3		Rp. 150.000.000,00	Saat banjir jembatan tenggelam
105	Pembuatan siring beronjong	Desa Juai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Menahan longsor
106	Pembangunan Gedung TPA	Desa Panimbaan Rt.2		Rp. 199.000.000,00	Untuk pelajaran di sekolahn TPA kegiatannya di halaman masjid
107	Rehab langgar nurul ibadah	Desa Panimbaan Rt.1		Rp. 199.000.000,00	Langgar tidak layak pakai
108	Pembuatan pagar kuburan muslimin	Desa Panimbaan Rt.1		Rp. 300.000.000,00	Kuburan banyak dimasuki hewan liar
109	Pembangunan gedung serbaguna untuk olahraga	Desa Panimbaan		Rp. 400.000.000,00	Untuk menunjang aktifitas kegiatan masyarakat didalam bidang

		Rt.2			olahraga maupun kegiatan lainnya
110	Kolam budidaya ikan bio flok	Desa Panimbaan Rt.2		Rp. 190.000.000,00	Menambah ekonomi masyarakat serta mencukupi kebutuhan rumah tangga khususnya dibidang ketahanan pangan
111	Perbaikan jalan provinsi (Jalan A.Yani) jalan raya	Desa Panimbaan Rt.1 dan Rt.2		Rp. 5.000.000.000,00	Jalan banyak yang berlobang sangat membahayakan keselamatan pengendara
112	pembuatan jalan alternatif cor beton	Desa Buntu Karau Rt.01, Rt.02, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 250.000.000,00	Untuk evakuasi jalan alternatif tatkala banjir
113	Pembuatan jalan ulin persawahan	Desa Buntu Karau Rt.04 dan Rt.6		Rp. 350.000.000,00	Karna tidak ada jembatan untuk penyebrangan
114	Pembuatan siring ulin disamping jembatan	Desa Buntu Karau Rt.06		Rp. 200.000.000,00	Menahan erosi yang semakin menyisir ke arah jembatan
115	Pembuatan jembatan gantung	Desa Buntu Karau Rt.03		Rp. 500.000.000,00	Jembatan rusak
116	Pembuatan pagar beton kuburan muslimin	Desa Buntu Karau Rt.03		Rp. 200.000.000,00	Belum ada bangunannya
117	Pembuatan dreinase saluran air (jalan rumah)	Desa Buntu Karau Rt.04		Rp. 300.000.000,00	Karna belum ada
118	Pembuatan dreinase saluran air (jalur ke sungai)	Desa Buntu Karau Rt.04		Rp. 300.000.000,00	Tidak adanya saluran limbah warga ke pembuangan ke sungai
119	Pembuatan jalan produksi cor beton padang bilum	Desa Buntu Karau		Rp. 350.000.000,00	Tidak ada akses untuk kesana

		Rt.04			
120	Pembuatan cor beton akses ke persawahan	Desa Buntu Karau Rt.06		Rp. 250.000.000,00	Tidak ada akses untuk kesana
121	Pengadaan alat bermain/edukasi TK dan PAUD	Desa Buntu Karau Rt.02 dan Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai alat edukasi
122	Rumah tahfiz	Desa Buntu Karau Rt.02 dan Rt.04		Rp. 200.000.000,00	Belum mempunyai alat
123	Pembuatan gedung PUSKESDES	Desa Buntu Karau Rt.06		Rp. 150.000.000,00	Gedung yang ada tidak memadai
124	Pembuatan saluran irigasi	Desa Buntu Karau Rt.02		Rp. 100.000.000,00	Belum memiliki saluran air di persawahan
125	Pembuatan jalan cor beton tembok lama	Desa Buntu Karau Rt.03		Rp. 250.000.000,00	Jalan rusak
126	Pembangunan MI miftahudin dan tempat ibadah	Desa Buntu Karau Rt.01		Rp. 316.000.000,00	Bangunan tidak layak pakai
127	Pembuatan jembatan ulin penyebrangan	Desa Buntu Karau Rt.03		Rp. 150.000.000,00	Rusak
128	Peningkatan muara jembata murung	Desa Hukai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Sering terendam banjir
129	Peningkatan jembatan sungai hukai	Desa Hukai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Jembatan rusak
130	Jalan gang Pa. Amin	Desa Hukai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Jalan berlubang dan susah dilewati
131	Jembatan gantung	Desa Hukai Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Jembatan rusak

132	Jembatan paring manis	Desa Hukai Rt.2		Rp. 150.000.000,00	Jembatan rusak
133	Pengerokan baruh Hukai	Desa Hukai Rt.1		Rp. 500.000.000,00	Baruh dangkal dan ditumbuhi tumbuhan liar
134	Pembangunan tempat posyandu	Desa Hukai Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Tidak ada tempat posyandu
135	Pembangunan TPS3R	Desa Hukai Rt.1		Rp. 600.000.000,00	Belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara
136	Drainase	Desa Hukai Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Sering tergenang air ke jalan saat musim hujan
137	Pembuatan jalan barai Rt 2 cor beton	Desa Sirap Rt.2		Rp. 500.000.000,00	Karena jalan nya sangat rusak dan sulit untuk dilalui kendaraan
138	Pembuatan jembatan cor box calpit sungai bilum	Desa Sirap Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Jembatannya hampir runtuh
139	Pembuatan bronjung tepi sungai balangan desa sirap	Desa Sirap Rt.1 dan Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Tanah tepi sungai longsor dekat jalan dan jembatan
140	Pembuatan jembatan gantung Desa Sirap Rt 1	Desa Sirap Rt.1		Rp. 300.000.000,00	Untuk membawa hasil petanian di sawah
141	Pembuatan jembatan gantung Desa Sirap Rt 4	Desa Sirap Rt.4		Rp. 300.000.000,00	Untuk membawa hasil petanian di sawah
142	Pembuatan parit Rt 1, Rt 2, Rt 3, Rt 4	Desa Sirap Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 500.000.000,00	air menggenangi jalan dan halaman rumah warga
143	Pembuatan jalan pruduksi cor beton bara'i Desa Sirap Rt 3	Desa Sirap Rt.3		Rp. 400.000.000,00	Jalan berlobang dan berair sulit di lewati kendaraan
144	Mengadaan traktor pembajak sawah 5 buah	Desa Sirap Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 125.000.000,00	Petani belum memiliki traktor sawah
145	Pengadaan alat mutur combin padi 2 buah	Desa Sirap Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 600.000.000,00	Untuk mempermudah memanen padi dan hemat biaya
146	Rehab total ruang kelas TK Desa Sirap	Desa Sirap Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Ruang kelas TK sudah tidak layak dan siswa banyak
147	Pengadaan obat dan pupuk padi dan sayuran	Desa Sirap Rt.1,		Rp. 150.000.000,00	Untuk menyuburkan dan meningkatkan hasil panen padi dan

		Rt.2, Rt.3 dan Rt.4			sayur
148	Pagar kuburan muslimin Rt 2	Desa Sirap Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Untuk menjaga dari gangguan binatang liar
149	Pengadaan tanah TPS sampah Desa Sirap	Desa Sirap Rt.2		Rp. 300.000.000,00	Sampah masyarakat dan sampah pasar sangat banyak
150	Lampu tenaga surya 10 titik	Desa Sirap Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 150.000.000,00	Jalan dipersimpangan rawan kecelakaan
151	Pembuatan jalan lingkungan cor beton Desa Sirap Rt 1	Desa Sirap Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Perumahan belum memiliki akses jalan yang memadai
152	Pembuatan jalan kuburan muslimin cor beton Desa Sirap Rt 2	Desa Sirap Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Agar mempermudah akses ke kuburan
153	Pembuatan jalan lingkungan cor beton Desa Sirap Rt 3	Desa Sirap Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Perumahan belum memiliki akses jalan yang memadai
154	Pembuatan jalan lingkungan cor beton Desa Sirap Rt 4	Desa Sirap Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Perumahan belum memiliki akses jalan yang memadai
155	Pembuatan jalan produksi garonggang Desa Sirap Rt 1	Desa Sirap Rt.1		Rp. 200.000.000,00	Jalan produksi berlobang dan berair
156	Gedung Posyandu	Desa Sirap Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Untuk mempermudah pelayanan posyandu balita, pospindu, dan lansia
157	Normalisasi cekdam	Desa Sumber Rejeki Dusun 6/7 Rt.14, Rt.8 dan Rt.6		Rp. 500.000.000,00	Karna kondisi cekdam saat ini dangkal dan banyak tumbuh rumput dan lumut sehingga cekdam tidak bisa digunakan

158	Pembangunan jembatan box culvaret	Desa Sumber Rejeki Rt.5, Rt.6 dan Rt.13		Rp. 600.000.000,00	Karna jembatan rusak sehingga susah dilewati
159	Pengecoran jalan antar Rt	Desa Sumber Rejeki Rt.8, Rt.10, Rt.11, Rt.12 dan Rt.7		Rp. 1.000.000.000,00	Kondisi jalan masih batu dan tanah
160	PJU konvensional	Desa Sumber Rejeki Rt.3 sampai dengan Rt.15		Rp. 200.000.000,00	PJU belum rata
161	Perbaikan Pintu Air Cekdam	Desa Sumber Rejeki Rt.6 dan Rt.14		Rp. 400.000.000,00	Pintu rusak dan jebol tidak bisa menahan air
162	Pengadaan sarpras peternakan	Desa Sumber Rejeki Rt.1 sampai dengan Rt.15		Rp. 750.000.000,00	Belum adanya mesin pencacah rumput
163	Pengadaan sarpras pertanian	Desa Sumber Rejeki Dusun 6 dan Dusun 7		Rp. 300.000.000,00	Belum adanya traktor bajak
164	Pembangunan/perbaikan lapangan sepak bola	Desa Sumber Rejeki Dusun 6		Rp. 200.000.000,00	Kondisi lapangan saat ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lapangan bola dan harus diperbaiki

		Rt.10			
165	Pelebaran jalan poros desa	Desa Sumber Rejeki Dusun 6 dan Dusun		Rp. 10.000.000.000,00	Jalan poros sempit
166	Pengadaan sound sistem	Desa Sumber Rejeki Rt.3		Rp. 400.000.000,00	Kondisi alat yang ada rusak
167	Gamelan komplit kuda lumping	Desa Sumber Rejeki Rt.8		Rp. 200.000.000,00	Alat yang ada rusak dan tidak bisa digunakan
168	Jalan tembok lama	Desa Muara Ninian Rt.01		Rp. 150.000.000,00	Penambahan perbaikan
169	Bok carpet	Desa Muara Ninian Rt.01		Rp. 100.000.000,00	Perbaikan
170	JUT pertanian	Desa Muara Ninian Rt.01		Rp. 100.000.000,00	Perbaikan
171	JUT pertanian	Desa Muara Ninian Rt.02		Rp. 200.000.000,00	Perbaikan
172	JUT pertanian	Desa Muara Ninian Rt.03		Rp. 300.000.000,00	Perbaikan
173	Pembangunan JUT karukan	Desa Hamarung Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Jalan rusak
174	Drainase	Desa Hamarung		Rp. 300.000.000,00	Setiap hujan air menggenangi jalan raya

		Rt.1, Rt.2 dan Rt.3			
175	Gedung posyandu	Desa Hamarung Rt.3		Rp. 100.000.000,00	Karna belum memiliki gedung posyandu
176	Bendungan/ pengairan sawah sungai rumbia	Desa Hamarung Rt.2		Rp. 500.000.000,00	Setiap musim tanam padi lahan kekeringan
177	Bantuan bibit obat dan pupuk perkebunan	Desa Hamarung Rt.1, Rt.2 dan Rt.3		Rp. 80.000.000,00	Karna belum memiliki
178	Pengaspalan jalan	Desa Lalayau Rt.2		Rp. 500.000.000,00	Karena jalan rusak
179	Penambahan bronjong jembatan	Desa Lalayau Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Karna jembatan rusak parah
180	Lambatnya proses panen padi karena kurangnya alat pertanian	Desa Lalayau Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 300.000.000,00	Karna sering terlambatnya proses panen padi
181	Perpanjangan jembatan	Desa Lalayau Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Karna jembatan mau roboh
182	Pembuatan drainase tepi jalan raya	Desa Mungkur Uyam Rt.4		Rp. 250.000.000,00	Saluran air tersumbat
183	Perbaiki drainase jalan kenangan lama	Desa Mungkur Uyam Rt.2		Rp. 200.000.000,00	Saluran air tersumbat
184	Pembuatan jembatan ulin	Desa Mungkur Uyam Rt.4		Rp. 200.000.000,00	Untuk mempermudah warga mengambil hasil perkebunan
185	Pembuatan jalan lingkungan	Desa Mungkur Uyam Rt.4		Rp. 2.500.000.000,00	Karena jalan rusak
186	Pagar kubur muslimin	Desa Sungai		Rp. 200.000.000,00	Belum memiliki pagar

		Batung Rt.1			
187	Atap kolam pemancingan	Desa Sungai Batung Rt.3		Rp. 150.000.000,00	Belum memiliki atap
188	Drainase	Desa Sungai Batung Rt.2		Rp. 500.000.000,00	Belum memiliki saluran air
189	Bronjong	Desa Sungai Batung Rt.3		Rp. 400.000.000,00	Belum memiliki
190	Gedung serba guna buat olahraga	Desa Sungai Batung Rt.3		Rp. 300.000.000,00	Belum memiliki
191	Pengaspalan jalan poros trans	Desa Tawahan Rt.4		Rp. 4.500.000.000,00	Jalan rusak
192	Pembuatan drainase	Desa Tawahan Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 1.000.000.000,00	Belum memiliki saluran air
193	Penerangan jalan desa	Desa Tawahan Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 175.000.000,00	Belum memiliki PJU
194	Pembuatan irigasi	Desa Tawahan Rt.1, Rt.2, Rt.3 dan Rt.4		Rp. 300.000.000,00	Belum memiliki saluran air di persawahan
195	JUT pertanian	Desa Mihu		Rp. 500.000.000,00	Jalan rusak
196	Pagar kuburan muslimin	Desa Mihu Rt.5		Rp. 200.000.000,00	Belum memiliki pagar

197	Bedah rumah	Desa Mihi Rt.2/3		Rp. 100.000.000,00	Rumah warga kurang layak ditempati
198	Perbaikan langgar	Desa Mihi Rt.4		Rp. 50.000.000,00	Renovasi langgar
199	Mesin traktor dan mesin pemotong padi	Desa Mihi Rt.1 (Kelompok Tani Sesama)		Rp. 100.000.000,00	Belum memiliki
200	Pembuatan Siring Permanen	Desa Galumbang Rt.3		Rp. 750.000.000,00	Untuk menahan tanah yang longsor
201	Pengaspalan jalan dari Rt 2 sampai Rt 3	Desa Galumbang Rt.2 dan Rt.3		Rp. 500.000.000,00	Akses jalan enak buat dilewati
202	Gorong-gorong dan drainase Rt 3	Desa Galumbang Rt.3		Rp. 200.000.000,00	Untukantisipasi banjir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada dasarnya kebijakan nasional bersifat makro, baik itu dalam pembangunan maupun perekonomian. SKPD Kecamatan Juai dalam menentukan prioritas program/kegiatan lebih mengutamakan perbaikan kelembagaan sebagai modal awal mendukung lancarnya proses pelayanan. Secara kasat mata, program/kegiatan SKPD Kecamatan Juai keluar dari kebijakan nasional, namun secara filosofi tetap berada digaris depan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan renja SKPD pada dasarnya sama dengan tujuan Renstra SKPD, yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Juai Tahun 2025
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Juai Tahun 2025
3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2025
4. Terciptanya suasana lingkungan yang kondusif.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2023, maka jika dilihat secara riil tujuan dari Renstra SKPD ini berjalan dengan lancar, sebab program/kegiatan yang dicanangkan merupakan penjabaran dari Renstra yang ada, sehingga terjadi sinkronisasi yang tentu diharapkan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025 terkait dengan Tugas Fungsi Kecamatan Juai, didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai Tahun 2021-2026. Dengan tetap memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan sesuai dengan Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat

dan Abdi Negara”. Dengan Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik”. Adapun yang menjadi Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik”. Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Juai

Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 :					
Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2024
Terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial	87,59	87,62	87,65
	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	60 LKD	70 LKD
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	persentase desa yang tertib	-	100%	100%

	desa	administrasi pemerintahan			
		persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Juai dalam dokumen rancangan akhir rencana kerja untuk Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.539.933.152,00,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Prioritas Kecamatan Juai di Tahun 2025 yang selaras dengan Tujuan Rencana Kerja (Renja) yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik. Adapun program yang mendukung pencapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk keterangan lebih jelas mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pendanaan kegiatan Kecamatan Juai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Juai
Tahun Anggaran 2025**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
PEMERINTAHAN	DAERAH	KABUPATEN/ KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

			Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP
	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kejadiannya
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Juai

Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Kecamatan Juai, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Juai Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam rancangan akhir Renja Tahun 2025, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kecamatan Juai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Balangan

SKPD : Kecamatan Juai

Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Balangan	67,50	4.346.915.952,00	APBD		68,00	4.866.826.280,00
'7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	172.884.700,00	APBD		100%	310.819.900,00
'7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 dokumen	22.254.600,00	APBD		2 dokumen	73.966.100,00
'7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	2 Dokumen	32.086.900,00	APBD		2 Dokumen	74.145.600,00
'7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	Kab.	2	113.827.600,00	APBD		2	147.708.200,00

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Dokumen				Dokumen	
'7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Balangan	1 Dokumen	4.715.600,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
'7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Kab. Balangan	100%	3.367.434.700,00	APBD		100%	3.434.120.080,00
'7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	22 orang per bulan	3.208.671.900,00	APBD		22 orang per bulan	3.269.842.080,00
'7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	12 Dokumen	158.762.800,00	APBD		12 Dokumen	164.278.000,00
'7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100 %	28.613.000,00	APBD		100 %	25.893.000,00
'7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Balangan	15 Orang	28.613.000,00	APBD		15 Orang	25.893.000,00

		Peraturan Perundang-Undangan							
'7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	152.396.900,00	APBD		100%	380.319.400,00
'7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	4.311.100,00	APBD		1 Paket	7.204.700,00
'7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	107.084.700,00	APBD		1 Paket	134.149.500,00
'7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	1 Laporan	41.001.100,00	APBD		1 Laporan	238.965.200,00
'7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	366.571.252,00	APBD		100%	342.912.200,00
'7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	1 Laporan	199.936.352,00	APBD		1 Laporan	101.085.300,00
'7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	131.534.900,00	APBD		12 Laporan	142.584.900,00

'7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	1 Laporan	35.100.000,00	APBD		1 Laporan	99.242.000,00
'7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	259.015.400,00	APBD		100%	372.761.700,00
'7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	13 Unit	129.181.900,00	APBD		13 Unit	245.550.700,00
'7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	2 unit	129.833.500,00	APBD		2 unit	127.211.000,00
'7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	Kab. Balangan	1 Laporan	420.186.900,00	APBD		1 Laporan	336.723.900,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	Kab. Balangan	100%	159.997.800,00	APBD		100%	176.723.900,00

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	1 Laporan	159.997.800,00	APBD		1 Laporan	176.723.900,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Balangan	100%	260.189.100,00	APBD		100%	160.000.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Balangan	1 Laporan	260.189.100,00	APBD		1 Laporan	160.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	Kab. Balangan	1 Laporan	205.054.000,00	APBD		1 Laporan	366.530.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kab. Balangan	100%	148.946.500,00	APBD		100%	212.230.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Kab. Balangan	70 Lembaga Kemasyarakatan	44.328.800,00	APBD		70 Lembaga Kemasyarakatan	84.150.000,00

		Perencanaan Pembangunan di Desa							
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Balangan	1 Dokumen	60.785.000,00	APBD		1 Dokumen	85.390.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	1 Laporan	43.832.700,00	APBD		1 Laporan	42.690.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kab. Balangan	100%	56.107.500,00	APBD		100%	154.300.000,00
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	Kab. Balangan	60 Keluarga	56.107.500,00	APBD		60 Keluarga	154.300.000,00

		Berkualitas dan Berdaya Saing							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	Kab. Balangan	1 Laporan	160.177.000,00	APBD		1 Laporan	208.534.600,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kab. Balangan	100%	160.177.000,00	APBD		100%	208.534.600,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	1 Laporan	160.177.000,00	APBD		1 Laporan	208.534.600,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	Kab. Balangan	1 Laporan	83.596.400,00	APBD		1 Laporan	191.587.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kab. Balangan	100%	83.596.400,00	APBD		100%	191.587.000,00

		umum sesuai penugasan kepala daerah							
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Balangan	130 Orang	83.596.400,00	APBD		130 Orang	191.587.000,0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	Kab. Balangan	1 Laporan	324.002.900,00	APBD		1 Laporan	510.868.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	Kab. Balangan	21 Desa	324.002.900,00	APBD		21 Desa	510.868.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	106.360.100,00	APBD		1 Dokumen	163.700.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen yang	Kab.	1	79.816.800,00	APBD		1	76.891.600,00

	Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Balangan	Dokumen				Dokumen	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	30.317.700,00	APBD		1 Dokumen	64.224.000,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Balangan	1 Dokumen	60.017.700,00	APBD		1 Dokumen	74.482.400,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	47.490.600,00	APBD		1 Dokumen	131.570.000,00
TOTAL					5.539.933.152,00				6.481.069.780,00

4.2. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi

Dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Juai tahun 2021- 2026 dijelaskan bahwa tujuan SKPD Kecamatan yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik” dengan indikator pengukuran berupa nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Sedangkan yang menjadi Sasaran SKPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan pendanaan dan kegiatan tahun 2025 Kecamatan Juai wajib memperhatikan strategi pencapaian tujuan tersebut. Karena dengan tercapainya tujuan SKPD maka akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan sebagai tujuan akhir dari seluruh pencapaian SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

Jika dilakukan analisis atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai tahun 2025 dapat dirangkumkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi pelayanan masyarakat akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dikarenakan adanya pemenuhan atas kebutuhan sosial masyarakat berupa layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Hal ini didukung dengan disediakannya dana untuk pencapaian sasaran tersebut dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat akan memberikan dampak pada tingkat pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat berupa pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum atas bantuan peran pemerintah daerah. Sasaran ini didukung oleh penyediaan dana pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan akan memberikan dampak pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat atas lingkungan yang aman dan tentram. Lingkungan yang kondusif akan menunjang masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perwujudan dari sasaran ini didukung oleh penyediaan anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa akan memberikan dampak sosial bagi masyarakat berupa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan layanan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, sesuai dengan undang-undang pemerintahan desa dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya akan meningkatkan dukungan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Pencapaian sasaran tersebut didukung penyediaan anggaran oleh Kecamatan Juai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB.V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah panduan dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi Kecamatan Juai untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan merupakan manivestasi dari respon Kecamatan Juai Kabupaten Balangan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat serta diagnose lingkungan yang efektif. Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasional organisasi. Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Kecamatan Juai Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan , adil dan akuntabel.

Juai, Agustus 2024



NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP.19800127 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No. 03 Mungkur Uyam (71665)

KEPUTUSAN CAMAT JUAI NOMOR 050.11/89.1/CJ/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN 2025

CAMAT JUAI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Juai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2025 mempunyai tugas Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUAI
Pada tanggal : Maret 2024



NANANG EDWARD, S.Sos., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800127 200604 1 016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JUAI TAHUN 2025**

NO	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NANANG EDWARD, S.Sos., MM NIP. 19800127 200604 1 016	Camat	Pengarah
2	ERLIYANTI, SE NIP. 198510202010012031	Sekcam	Koordinator
3	HUJAIMAH, S.Kom NIP.19880212 201001 2 016	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	YANTI MASITAH, S.Sos, M.AP NIP. 196703191987032009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	DEWI BUDI ASTUTI, S.Pd NIP.19820305201001 2 017	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	MILI YUSMAWATI, S.Sos NIP. 198011172006042024	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	H. NURYONO, S.Kep NIP. 197305071996021002	Kasi Pemerintahan	Anggota
8	MUHAMMAD RUSDI, SE NIP. 19770304 200501 1 010	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
9	FERI ARIANTI, S.Pd.AUD NIP. 198402152007012002	Kasi Pembangunan	Anggota

CAMAT JUAI

NANANG EDWARD, S.Sos., MM.
Pembina (IV/a)

NIP. 19800127 200604 1 016